

ANALISIS KEEFEKTIFAN PROSES PENCAIRAN DANA PADA KANTOR PAJAK (KPP) PRATAMA BEKASI UTARA

Natrion

Universitas Satya Negara Indonesia

e-mail: natribach@gmail.com

Diterima	Direvisi	Disetujui
28-07-2022	04-08-2022	15-08-2022

Abstrak - Melihat bukti empiris pengaruh variabel Pengawasan, Sumber Daya Manusia (SDM), Standar Operasional Prosedur (SOP) serta Sistem Informasi terhadap efektifitas proses pencairan dana pada KPP Pratama Bekasi Utara. Jenis penelitian kausal, untuk mengidentifikasi pengaruh variabel independen terhadap dependennya. Populasi dan sampel adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari satker (Satuan Kerja) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bekasi. Jenis data primer yang diperoleh dengan teknik pembagian kuisioner secara *online*. Metode analisis data berupa analisis statistik deskriptif, uji validitas, uji reabilitas, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda serta pengujian hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan Variabel Pengawasan, SDM, dan Standar Operasional Prosedur, tidak berpengaruh dalam efektifitas proses pencairan dana, sedangkan variabel Sistem Informasi berpengaruh terhadap efektifitas proses pencairan dana pada KPP Pratama Bekasi Utara.

Kata Kunci : Pengawasan, SDM, SOP, serta Sistem Informasi; Keefektifan Proses Pencairan Dana.

***Abstract** - Looking at empirical evidence of the influence of the variables Supervision, Human Resources (HR), Standard Operating Procedures (SOP) and Information Systems on the effectiveness of the process of disbursing funds at KPP Pratama, North Bekasi. This type of clause research, to identify the effect of the independent variable on the dependent. The population and sample are Commitment Making Officers (PPK) from the Bekasi State Treasury Service Office (Work Unit). The type of primary data obtained by the online questionnaire distribution technique. Methods of data analysis in the form of descriptive statistical analysis, validity test, reliability test, classical assumption test, multiple linear regression and hypothesis testing. The results showed that the Supervision, HR, and Standard Operating Procedures variables had no effect on the effectiveness of the disbursement process, while the Information System variable had an effect on the effectiveness of the disbursement process at KPP Pratama, North Bekasi.*

Keywords: *Supervision, HR, SOP, and Information Systems; Effectiveness of the Disbursement Process;*

PENDAHULUAN

APBN adalah implementasi dari pengelolaan keuangan yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Penerimaan Negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan non pajak serta hibah. APBN digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sistem pengelolaan keuangan pemerintahan yang baik perlu merencanakan pentingnya penyerapan budget yang dikelola. Undang-Undang menyatakan, kepada penyelenggaraan pemerintah untuk membuat laporan realisasi anggaran, *balance sheet*

(neraca) arus kas (*Cash flow*) yang disusun sesuai dengan SAP sebagai bentuk pertanggungjawaban APBN dan atau APBD. Untuk mendukung tugas dan fungsi KPP Pratama Bekasi Utara anggaran dikelola oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). KPA dapat menunjuk seorang Bendahara untuk melakukan pengelolaan kas seperti, Pengeluaran dan penerimaan kas, penyimpanan, pembayaran, penatausahaan, dan bertanggung jawab terhadap kas.

Proses pencairan dana pada KPP Pratama Bekasi Utara berupa pembayaran belanja gaji pegawai, belanja barang dan/atau jasa operasional dan belanja modal. Masalah yang timbul dalam proses pencairan dana dapat mengakibatkan operasional kegiatan yang mendukung tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara menjadi terganggu.

Koordinasi yang kurang antar Satker di KPP Pratama Bekasi Utara mengakibatkan proses pencairan dana menjadi terlambat. Keterlambatan yang sering terjadi seperti: Salah mendaftarkan nama rekanan pada sistem KPPN, salah pemberian kode faktur pajak, salah pemberian kode jenis setoran pada Surat Setor Pajak (SSP) yang dipungut oleh Bendaharawan, kurang lampiran bukti setor pajak Pasal 4 ayat 2 atas UMKM 0,5%, serta jangka waktu penyampaian Surat Perintah Membayar ke KPPN yang tidak sesuai dengan ketentuan batas waktu penyelesaian tagihan 17 hari kerja setelah timbul hak tagih kepada Negara sesuai dengan PMK Nomor: 170/PMK.05/2010.

Faktor-faktor terlambatnya proses pencairan dana di atas merupakan sebagai akibat kurangnya pengawasan, Sistem Operasional Prosedur (SOP) serta SDM dalam menangani proses pencairan dana pada Satker KPP Pratama Bekasi Utara. Pengawasan digunakan untuk mengendalikan, memantau dan memberikan arahan terhadap kegiatan yang dapat meningkatkan efektivitas proses pencairan dana. Manusia serta teknologi merupakan menjadi suatu kesatuan dan kedua unsur yang tidak terpisahkan. Kedua elemen tersebut saling terkait satu sama lainnya yang membentuk suatu system, yang lebih dikenal dengan istilah system information.

Dari gambaran latarbelakang diatas dalam proses pencairan dana, peneliti ingin mencari penjelasan tentang faktor yang menjadi penyebab kurang efektifitasnya proses penerbitan SP2D dipemerintahan pusat dengan mengangkat kasus nyata pada KPP Pratama Bekasi Utara dengan judul “Analisis Kefektifan Proses Pencairan Dana Pada Kantor Pajak Pratama Bekasi Utara”.

Landasan Teori

1. Anggaran

Anggaran APBN merupakan rencana tahunan keuangan pemerintah melalui persetujuan DPR. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun.

2. Satuan Kerja

Satuan Kerja merupakan bagian/unsur dari suatu unit organisasi pada Kementerian Negara atau Lembaga yang melaksanakan beberapa atau berbaagi macam kegiatan dari suatu organisasi yang menelan anggaran APBN.

3. Beberapa Istilah Dalam Pengelolaan APBN

a. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

KPPN merupakan lembaga yang berada dibawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

b. Surat Perintah Pembayaran (SPP)

SPP merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh PPK dan disampaikan atau diserahkan kepada PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk selaku pemberi kerja untuk selanjutnya diteruskan kepada Pejabat Penandatanganan SPM.

c. Surat Perintah Membayar (SPM)

SPM merupakan dokumen yang dikeluarkan serta dipergunakan Pengguna Budget/KPA atau pejabat lainnya yang ditunjuk untuk pencairan uang kas atau dana yang berasal dari List Isian Pelaksanaan Anggaran (PA) atau dokumen lain yang dipersamakan.

4. Pengawasan

Pengawasan salah satu bentuk pengendalian manajerial yang erat kaitannya dengan keterpencapaian tujuan organisasi, sehingga pengawasan didalam suatu organisasi menjadi sangat mutlak untuk dilaksanakan. Pengawasan yang baik akan mempengaruhi efektifitas proses pencairan dana dalam pelaksanaan APBN yang dilakukan oleh pejabat pemerintah sebagai berikut ini:

1). Tugas Pokok Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

PPK memiliki tugas pokok dalam penggunaan APBN yang didelegasikan oleh Menteri atau kepala Lembaga sebagai Pengguna budget antara lain: a. Penyusunan rencana kegiatan dan pencairan dana, b. Membuat perjanjian atau MOU dengan berbagai pihak penyedia barang/jasa, c. Menpersiapkan, menyelenggarakan, dan pengendalian perikatan-perikata atau kontrak dengan pihak supply barang dan jasa, d. Menpersiapkan bukti pendukung yang lengkap dan valid, menerbitkan dan menyampaikan Surat PP kepada Pejabat Penandatanganan-SPM.

2). Tugas Pokok Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM)

PPSPM memiliki tugas pokok dalam penggunaan APBN yang didelegasikan oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran antara lain: a. Melakukan pengujian SPP beserta dokumen pendukungnya yang lengkap dan benar. b. Melaksanakan pembebanan penagihan kepada Negara, c. Membuat dan menyetujui dengan penandatanganan SPM.

5. Standar Operating Procedure (SOP)

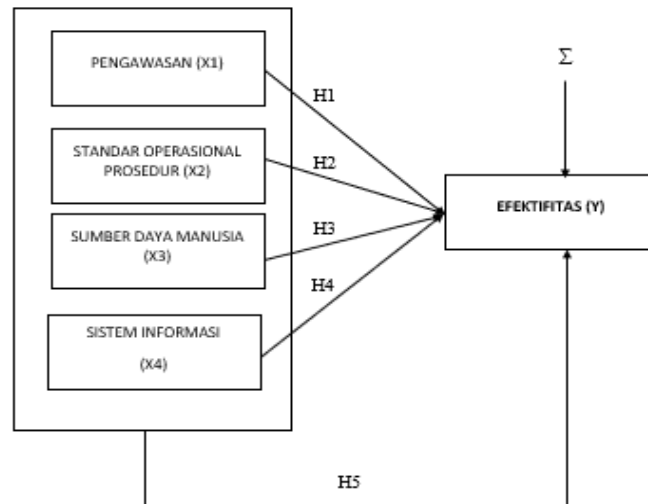
Prosedur adalah merupakan bukti yang lebih terperinci dan jelas beserta penjabarannya setiap metode yang digunakan dalam pengimplementasian serta pelaksanaan kebijakan dalam sebuah lembaga atau organisasi seperti yang ditetapkan dalam pedoman.

6. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia merupakan semua kekayaan atau dapat dikatakan sebagai asset yang dimiliki entitas untuk mencapai tujuannya, karena kemajuan dan bertumbuhnya suatu perusahaan sangat bergantung dan dipengaruhi oleh produktivitas tenaga kerja yang ada di perusahaan. Peran SDM dalam proses pencairan dana sangat vital karena setiap kegiatan yang dilakukan didalam proses pencairan dana membutuhkan tenaga manusia.

Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap sebuah masalah yang perlu diuji kebenarannya melalui suatu pengujian empiris yang berkaitan dengan masalah yang terjadi.



Kerangka Pemikiran Teoritis

Dari kerangka berikut dapat ditarik hipotesis :

- H₁ : Pengawasan berpengaruh terhadap Efektifitas Proses Pencairan Dana
- H₂ : SOP berpengaruh terhadap Efektifitas Proses Pencairan Dana
- H₃ : SDM berpengaruh terhadap Efektifitas Proses Pencairan Dana
- H₄ : Sistem Informasi berpengaruh terhadap Efektifitas Proses Pencairan Dana
- H₅ : Pengawasan, SOP, SDM, dan Sistem Informasi berpengaruh terhadap Efektifitas Proses Pencairan Dana

Metodologi Penelitian

Desain penelitian kausal. Riset/ Penelitian dilaksanakan di Kantor Pajak Pratama Bekasi Utara. Populasi penelitian Satuan Kerja. Jumlah sampel penelitian 75 Satker. Jenis data primer yang diperoleh secara langsung dengan pembagian kuisioner secara *online*, metode analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda.

Hasil dan Pembahasan

a. Analisa Statistics Deskriptif

Tabel 1. Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengawasan	75	27.00	35.00	31.0933	1.71774
SOP	75	19.00	25.00	22.8933	1.77500
SDM	75	30.00	40.00	36.4933	2.63743
Sistem Informasi	75	17.00	25.00	22.8133	2.11618
Efektifitas	75	17.00	25.00	23.1867	1.95692
Valid N (listwise)	75				

Dari table 1 di atas hasil Analisis Pengujian Deskriptif Satker dijelaskan sebagai berikut :

- Hasil analisis deskriptif pada variabel pengawasan menunjukkan bahwa responden yang mengatakan penilaian rendah sekali didapatkan 27 responden dan sangat tinggi 35 responden, nilai mean 31,0933 dan standard deviasi sebesar 1.71774.
- Hasil analisis deskriptif variabel SOP menunjukkan bahwa responden yang mengatakan penilaian rendah sekali terdapat 19 responden dan sangat tinggi 25 responden dengan nilai mean sebesar 22.8933 dan standar deviasi sebesar 1.77500.
- Hasil analisis deskriptif variabel SDM menunjukkan bahwa responden yang menyatakan penilaian rendah sekali 30 responden dan sangat tinggi 40 responden

dengan nilai mean 36.4933 dan standar deviasi 2.63743

- Hasil analisis deskriptif variabel Sistem Informasi menunjukkan bahwa responden yang menyatakan penilaian rendah sekali 17 responden dan sangat tinggi 25 responden dengan nilai mean 22.8133 dan standar deviasi 2.11618
- Hasil analisis deskriptif variabel Efektifitas menunjukkan bahwa responden yang memberikan nilai rendah sekali 17 responden dan sangat tinggi 25 responden dengan nilai mean 23.1867 dan standar deviasi 1.95692.

b. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

**Tabel 2. Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		75
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.41799024
Most Extreme Differences	Absolute	.087
	Positive	.074
	Negative	-.087
Tes Statistics		.087
Asymp.Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Tes distribusi Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Sig Correction.		
d. This is a lower bound of the true sign.		

Sumber: Hasil Uji SPSS 26

Dari tabel2 di atas hasil output dari hasil uji normalitas One Sampel *Kolmogorov Smirnov Test* diketahui bahwa data yang digunakan paada riset ini terdistribusi secara normal. Hal ini dapat terlihat dari Asymp-Sig (2-tailed) yaitu 0,200 dimana dapat diartikan bahwa nilai signifikansi residualnya melebihi dari 0,05. (Sig > 0,05)

2. Uji Multikolonieritas.

Tabel 3. Uji Multikolonieritas

		Coefficients ^a				Collinearity Statistics	
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta	t		
1	(Constant)	4.711	3.197		1.473		
	Pengawasan	.058	.123	.051	.473	.638	1.565
	SOP	.152	.134	.138	1.133	.261	1.963
	SDM	.091	.105	.122	.868	.388	2.654
	Sistem Informasi	.433	.121	.468	3.587	.001	2.270

a. Dependent Variable: Efektifitas

b. Var (Pengawasan, SOP, SDM, Sistem Informasi)

Sumber : Hasil Uji SPSS 26

Dari tabel diatas hasil untuk responden Satuan kerja bahwa nilai *tolerance* pada semua variabel in-dependen melebihi dari 0,10 (Tol > 66 0,10) dan VIF pada seluruh variable independen lebih kecil dari 10 (VIF < 10). Maka hasil di atas menunjukkan bahwa tidak ada atau terdapat korelasi antara variabel independen dalam model regresi, dan dapat disimpulkan bahwa tidak ada terjadi multikolonieritas diantara variable bebasnya.

3. Uji Heterokedesitas.

Tabel 4. Uji Heteroskedesitas Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	13.719	3.460		3.965	.000
	Pengawasan	-.214	.133	-.264	-1.605	.117
	SOP	-.295	.168	-.327	-1.764	.086
	SDM	.105	.116	.192	.903	.372
	Sistem Informasi	-.203	.143	-.301	-1.426	.162

Dependent Variable: LNU2

Sumber : Hasil Uji SPSS 26

Dari table 4 di atas hasil *output* SPSS untuk responden Satuan kerja menunjukkan bahwa semua variabel independen memperoleh nilai sig > 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Tabel 5. Uji Autokorelasi Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.689 ^a	.475	.445	1.45794	1.869

a. Predictors: (Constant), Sistem Informasi, Pengawasan, SOP, SDM

b. Dependent Variable: Efektifitas

Sumber : Hasil Uji SPSS 26

Pada table 5 di atas diperoleh nilai Durbin-Watson (DW) untuk responden Satker adalah 1,869, pada tabel Durbin-Watson diperoleh nilai $du = 1,7390$, $dl = 1,5151$. Dengan kriteria $du < dw < 4-du$, maka $1,7390 < 1,869 < 2,261$ atau lebih besar dari du ($1,869 > 1,7390$) dan kurang dari $4 - du$ ($4 - 1,7390 = 2,261$) maka dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi.

c. Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 6. Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	4.711	3.197		1.473	0.145
	Pengawasan	0.058	0.123	0.051	0.473	0.638
	SOP	0.152	0.134	0.138	1.133	0.261
	SDM	0.091	0.105	0.122	0.868	0.388
	Sistem Informasi	0.433	0.121	0.468	3.587	0.001

a. Dependent Variable: Efektifitas

b. Variable: Pengawasan, SOP, SOP, Sistem Informasi

Sumber: Hasil Uji SPSS 26

Berdasarkan hasil pada tabel 12 di atas, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$\underline{Y = 4.711 + 0.058.X1 + 0.152.X2 + 0.091.X3 + 0.433.X4 + e}$$

Penjelasan dari persamaan regresi di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Nilai Konstanta berdasarkan persamaan regresi sebesar 4.711, ini dapat diartikan bahwa efektifitas akan bernilai 4.711 dengan diasumsikan semua variable independen bernilai 0.
- 2) Variabel Pengawasan memiliki koefisien regresi sebesar 0.058. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu-satuan variabel Pengawasan, dengan asumsi variabel lain bernilai 0 maka efektifitas akan meningkat sebesar 0,058.
- 3) Variabel SOP memiliki koefisien regresi sebesar 0.152. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu-satuan variabel SOP, dengan asumsi variabel lain bernilai 0 maka efektifitas akan meningkat sebesar 0,152.
- 4) Variabel SDM memiliki koefisien regresi sebesar 0.091. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu-satuan variabel SDM, dengan asumsi variabel lain bernilai 0 maka efektifitas akan meningkat sebesar 0,091.
- 5) Variabel Sistem Informasi memiliki koefisien regresi sebesar 0.433. Hal ini menunjukkan bahwa jika setiap kenaikan satu-satuan variabel Sistem Informasi, dengan asumsi variabel lain bernilai 0 maka efektifitas akan meningkat sebesar 0.433.

d. Uji t (Uji Parsial)

Tabel 7. Uji t (Parsial)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	4.711	3.197			1.473	0.145
Pengawasan	0.058	0.123	0.051		0.473	0.638
SOP	0.152	0.134	0.138		1.133	0.261
SDM	0.091	0.105	0.122		0.868	0.388
Sistem Informasi	0.433	0.121	0.468		3.587	0.001

a. Dependent Variable: Efektifitas

b. Variable: Pengawasan, SOP, SOP, Sistem Informasi

Sumber : Hasil Uji SPSS 26

Untuk menentukan t tabel ($t = \alpha/2 : n-k-1 = (0,50/2 : 75-4-1) = (0,025 : 70) = 1.99444$, maka t_{tabel} sebesar 1.99444. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel berikut:

- 1) Pengawasan, dalam penelitian ini memiliki nilai t_{hitung} 0.473, t_{tabel} sebesar 1,99444, maka t_{hitung} 0.473 < 1,99444 dan signifikan 0,638>0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H01 diterima, artinya variabel Pengawasan tidak berpengaruh terhadap Efektifitas proses pencairan dana pada KPP Pratama Bekasi Utara.
- 2) SOP, dalam penelitian ini memiliki nilai t_{hitung} 1.133, dan t_{tabel} sebesar 1,99444, maka t_{hitung} 1.133 < 1,99444 dan signifikan 0,261>0,05. Maka disimpulkan H02 diterima, artinya variabel SOP tidak berpengaruh terhadap Efektifitas proses pencairan dana pada KPP Pratama Bekasi Utara.
- 3) SDM, dalam penelitian ini memiliki nilai t_{hitung} 0.868, t_{tabel} sebesar 1,99444, maka t_{hitung} 0.868 < 1,99444 dan signifikan 0.388 > 0,05. Maka disimpulkan bahwa H03 diterima, artinya variabel SDM tidak berpengaruh terhadap Efektifitas proses pencairan dana pada KPP Pratama Bekasi Utara.
- 4) System Informasi, dalam penelitian ini memiliki nilai t_{hitung} 3.587, t_{tabel} sebesar 1,99444, maka t_{hitung} 3.587 > 1,99444 dan signifikannya 0.001 < 0,05. Maka dapat disimpulkan

Ha4 diterima, artinya variabel System Informasi berpengaruh positif secara signifikan terhadap Efektifitas proses pencairan dana pada KPP Pratama Bekasi Utara.

e. Uji F (Uji Simultan)

Menentukan F_{tabel} ($F=k:n-k$) $n=75$ $k=4$ ($F=4:75-4 = 4:71$), maka F_{tabel} sebesar 2,50.

Tabel 8. Uji F (Simultan)

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	134.595	4	33.649	15.830	0.000 ^b
Residual	148.792	70	2.126		
Total	283.387	74			

a. Dependent Variable: Efektifitas

b. Predictors: (Constant), Sistem Informasi, Pengawasan, SOP, SDM

Sumber : Hasil Uji SPSS 26

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa untuk responden satker nilai F_{hitung} sebesar 15.830 sedangkan F_{tabel} sebesar 2,50 dengan nilai signifikan 0,000. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($15.830 > 2,50$) dan tingkat signifikan $0,000 < 0,05$ maka dapat diartikan H_a diterima. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa variabel Pengawasan, SOP, SDM, dan Sistem Informasi secara simultan berpengaruh terhadap variabel Efektifitas proses pencairan dana.

f. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 9. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b			
Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	0.689 ^a	0.475	0.445

Predictors: (Constant), Sistem Informasi, Pengawasan, SOP, SDM

Dependent Variable: Efektifitas

Dari tabel di atas diperoleh hasil *Adjusted R Square* sebesar 0,445. ini menunjukkan bahwa variabel dependen Efektifitas proses pencairan dana pada KPP Pratama Bekasi Utara dapat dijelaskan oleh variabel pengawasan, SOP, SDM dan Sistem Informasi sebesar 47,50%. Sedangkan sisanya 52,5% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian.

INTERPRESTASI HASIL PENELITIAN

1. Pengaruh Pengawasan Terhadap Efektifitas Proses Pencairan Dana Pada KPP Pratama Bekasi Utara

Hasil uji t pada tabel 7 diketahui bahwa variabel Pengawasan dari Satker menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 0.473 dan nilai koefisien sebesar 0,058 dan nilai signifikannya sebesar 0,638. Tingkat signifikansi $0,638 > sig$ 0,05. Sehingga H_{01} diterima, artinya variabel

Pengawasan tidak berpengaruh terhadap Efektifitas proses pencairan dana pada KPP Pratama Bekasi Utara.

2. Pengaruh SOP Terhadap Efektifitas Proses Pencairan Dana Pada KPP Pratama Bekasi Utara

Hasil uji t pada tabel 7 diketahui bahwa variabel SOP dari Satker menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 1.133 dengan nilai signifikannya sebesar 0,261. Tingkat signifikansi $0,261 > 0,05$. sehingga H_0 2 diterima, artinya variabel SOP tidak berpengaruh terhadap Efektifitas proses pencairan dana pada KPP Pratama Bekasi Utara.

3. Pengaruh SDM Terhadap Efektifitas Proses Pencairan Dana Pada KPP Pratama Bekasi Utara

Hasil uji t pada tabel 7 dapat diketahui bahwa variabel SDM dari Satker menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 0.868 dengan hasil koefisien sebesar 0.0091 dan nilai signifikannya sebesar 0,388. Tingkat signifikansi tersebut lebih besar dari $\alpha = 0,05$. Sehingga H_0 3 diterima dan H_a 3 ditolak, artinya variabel SDM tidak berpengaruh terhadap Efektifitas proses pencairan dana pada KPP Pratama Bekasi Utara.

4. Pengaruh Sistem Informasi Terhadap Efektifitas Proses Pencairan Dana Pada KPP Pratama Bekasi Utara

Hasil uji t pada tabel 7 didapat nilai t_{hitung} sebesar 3.587 dan signifikannya 0,001. Tingkat sig $0,001 < 0,05$, dengan demikian H_a 4 diterima, artinya variabel Sistem Informasi berpengaruh positif secara signifikan terhadap Efektifitas proses pencairan dana pada KPP Pratama Bekasi Utara.

Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

- a. Variabel Pengawasan pada Satuan Kerja tidak berpengaruh terhadap Efektifitas proses pencairan dana pada KPP Pratama Bekasi Utara .
- b. Variabel SOP pada Satuan Kerja tidak berpengaruh terhadap Efektifitas proses pencairan dana pada KPP Pratama Bekasi Utara.
- c. Variabel SDM pada Satuan Kerja tidak berpengaruh terhadap Efektifitas proses pencairan dana pada KPP Pratama Bekasi Utara.
- d. Variabel Sistem Informasi pada Satuan Kerja menunjukkan bahwa variabel tersebut berpengaruh positif secara signifikan terhadap Efektifitas proses pencairan dana pada KPP Pratama Bekasi Utara.
- e. Berdasarkan uji simultan menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} maka dapat disimpulkan H_0 ditolak dan H_a diterima. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa keempat variabel independen, yaitu variabel Pengawasan, SOP, SDM, dan Sistem Informasi secara simultan berpengaruh terhadap Efektifitas Proses Pencairan Dana.

2. Saran

- 1) Masalah tidak efektifnya proses pencairan anggaran salah satu faktornya adalah Sistem Informasi (SI). Sistem Informasi ini yang mengolah data dari pembuatan Surat Perintah Pencairan, Surat Perintah Membayar menjadi output (SP2D) yang ditunggu baik oleh Satker. Ketika SI tidak dapat mendukung proses pencairan dana, maka segala yang terkait dengan kegiatan pembayaran baik kepada rekanan maupun pegawai tidak dapat dijalankan dengan efektif dan efisien. Akibatnya berdampak adanya keterlambatan pembayaran. Diharapkan adanya penambahan *bandwidth* (*server*) demi kelancaran proses penyelesaian tagihan.

- 2) Sistem Informasi tidak hanya berdampak pada proses pencairan dana, tetapi juga terhadap penilaian serta target realisasi anggaran pada Satker. Penyerapan Anggaran merupakan komponen yang penting dalam Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebagai alat kontrol dalam melakukan pengawasan pengelolaan Kinerja Keuangan Satker. Karena itu peningkatan kualitas Sistem Informasi diharapkan oleh banyak Satuan Kerja demi menunjang kegiatan proses pencairan dana berjalan dengan efektif dan efisien.
- 3) Masalah proses pencairan dana perlu dilakukan dengan teliti dan tepat waktu, mengingat perlunya menjaga integritas sebuah organisasi pemerintahan, perlunya sinergi dan komunikasi serta kerjasaman antar semua pihak yang terkait sehingga menghindari adanya keterlambatan atau kurang efektifnya proses pencairan dana pada KPP Pratama Bekasi Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, E. (2012). *Jurnal Akuntansi dan Pajak Vol. 15 No. 02, Januari 2014*. 14(02), 149–158.
- Kadmaer, E. A. (2020). Analisis Efektifitas Pencairan Dana Pada di Pemerintah Daerah: Kajian Empiris di Provinsi Papua Barat. *KEUDA (Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah)*, 5(1), 27–53. <https://doi.org/10.52062/keuda.v5i1.1215>
- Kesumawati, SI dan Rusmana, Citra, S. (2016). Pengaruh Pelatihan Dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan Fabu Hotel Bandung. *Skripsi Tesis*, 16–66.
- Made, S. (2017). Mengurangi Kesenjangan Anggaran Pendidikan Ganesha. *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program SI*, 7(1).
- PMK Nomor 170 Tahun 2010.pdf*. (n.d.) Tentang Penyelesaian Atas Beban dan Pendapatan Negara (APBN)
- PMK-190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
- Rusdi, M. (2020). Jurnal Mirai Management Jurnal Mirai Management. *Jurnal Mirai Managemnt*, 6(2), 122–136. <https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/mirai>
- Sanjaya, I., & Admaja, A. F. S. (2015). Pengukuran Kesuksesan Sistem Informasi Manajemen Frekuensi (SIMF) Dengan Model DeLone dan McLean. *Buletin Pos Dan Telekomunikasi*, 9(4), 449. <https://doi.org/10.17933/bpostel.2011.090405>
- Saptutyngsih dan Setyaningrum. (2019). *Metode Penelitian*. 1–9.
- Simanjuntak, K., Lastiningsih, N., Arieftiara, D., & Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, U. (2020). *PROSIDING BIEMA Business Management, Economic, and Accounting National Seminar EFEKTIVITAS SISTEM PENCAIRAN DANA ATAS PEMBAYARAN TUNJANGAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PT TASPEN (PERSERO)*. 1(1), 1–11.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Sutopo, Eng Yeri dan Achmad Slamet. 2017. *Statistika Inferensial*, Andi, Yogyakarta.
- Zaenudinsyah, F. (2016). Analisis Faktor Penyebab Penumpukan Pencairan Dana APBN pada Akhir Tahun Anggaran. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 1(1), 67–83. <https://doi.org/10.33105/itrev.v1i1.56>